

Kegiatan pengelolaan kearsipan dilaksanakan oleh tenaga pengelola kearsipan dan arsiparis yang berkompeten di bidang kearsipan. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terdapat peningkatan jumlah arsiparis Dinas Arsip dan Perpustakaan pada tahun 2020 sebanyak 14 orang.

Dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat dan pengelolaan arsip yang baik menurut kaidah kearsipan yang berlaku, perlu dilaksanakan pengembangan kualitas sumber daya perpustakaan dan kearsipan. Kegiatan pengembangan tersebut berfokus pada sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan, sumber daya manusia perpustakaan dan kearsipan dalam hal ini tenaga pengelola perpustakaan dan kearsipan, serta menjalin kerjasama dengan berbagai *stakeholders*, yaitu Perangkat Daerah, Organisasi, Instansi/Lembaga terkait, dan masyarakat. Adapun kegiatan pengembangan yang dilaksanakan yaitu berupa kajian peraturan perundangan tentang kearsipan, kegiatan festival dan jambore budaya baca, kegiatan kajian Indeks Baca Kota Bandung, dan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia perpustakaan dan kearsipan melalui bimbingan teknis dan *workshop*.

Pada tahun 2020 capaian kinerja Pengembangan Kualitas Sumber Daya Perpustakaan dan Kearsipan sebesar 100%. Capaian tersebut diukur melalui jumlah kegiatan pengembangan yang dilaksanakan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 3 kegiatan yang terdiri dari festival dan jambore budaya baca, kajian indeks baca Kota Bandung, dan kajian peraturan perundangan tentang kearsipan.

Perkembangan teknologi informasi Dinas Arsip dan Perpustakaan sudah mulai dilaksanakan dengan membuat beberapa sistem informasi perpustakaan dan kearsipan yang bertujuan untuk mempermudah layanan perpustakaan dan kearsipan baik kepada masyarakat maupun pada pengelolaan pustaka dan arsip. Sistem informasi perpustakaan dan kearsipan tersebut yaitu :

- Urusan perpustakaan
  1. INLIS Lite (*Integrated Library System*)
  2. SI INTAN (Sistem Informasi Integrasi Perpustakaan dan Taman Bacaan)
  3. e-Pustaka Bandung
- Urusan kearsipan
  1. SIKS (Sistem Informasi Kearsipan Statis)
  2. SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis)
  3. Aplikasi Depo Arsip (Arsip Vital)

### **2.3.3. Urusan Pilihan**

Fokus layanan urusan pilihan dilakukan melalui analisis kinerja atas indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi urusan kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan, dan perindustrian.

#### **a. Kelautan dan Perikanan**

Sektor perikanan di Kota Bandung, terbagi ke dalam dua jenis, yaitu budidaya ikan konsumsi dan budidaya ikan hias. Keterbatasan lahan dan lingkungan padat penduduk menjadi tantangan dalam pengembangan perikanan ikan tawar, sehingga jenis perikanan ini sebagian besar hanya dilakukan dalam pembudidayaan skala kecil. Tabel 2.80 merupakan tabel perkembangan indikator kinerja perikanan Kota Bandung Tahun 2016-2020.

**Tabel 2.80**

Indikator Kinerja Perikanan Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Perikanan	101,16%	100,02%	100,02%	100,38%	100,00%
2	Konsumsi ikan	102,53%	106,08%	103,11%	106,02%	105,98%
3	Produksi Ikan Konsumsi	2.965 ton	2.970,7 ton	2.970,63 ton	2.981,27 ton	1.921,09 Ton
4	Bertambahnya jumlah pelaku usaha bidang perikanan	N/A	N/A	N/A	85 orang	30 orang

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Pada tahun 2015-2020, nilai capaian produksi perikanan dan konsumsi ikan selalu melebihi dari target yang ditetapkan. Namun demikian, pada tahun 2020 peningkatan produksi ikan konsumsi (1.921,09 ton) mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun sebelumnya yaitu 2.981,27 ton. Hal tersebut terjadi karena dampak pandemik Covid-19 yang mempengaruhi aktivitas produksi sehingga produktivitas berkurang.

## b. Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara ke Kota Bandung semakin mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan antara lain oleh semakin meningkatnya infrastruktur kota dan peningkatan promosi pariwisata. Adapun kinerja urusan pariwisata kurun waktu 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.81.

**Tabel 2.81**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata di Kota Bandung  
Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan wisata (%)	122	102	108,98	113,14	38%
2	Lama kunjungan Wisata (hari)	N/A	N/A	2,21	2,21	1,7
3	PAD sektor pariwisata (%)	30	26	27,80	35,80	24%
4	Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	100
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	N/A	N/A	N/A	83,75
6	Indeks Brand Awareness	N/A	N/A	N/A	3,52	3,2
7	Persentase daya tarik wisata dikembangkan	N/A	N/A	N/A	25	25%
8	Persentase jasa usaha pariwisata berstandar baik	N/A	N/A	N/A	46,09	12,80
9	Persentase lembaga dan SDM Pariwisata meningkat kompetensinya (kriteria kompetensi sertifikasi)	N/A	N/A	N/A	2,58	3,4
10	Persentase rancangan kebijakan berbasis riset ( <i>evidence based policy</i> )	N/A	N/A	N/A	N/A	80
11	Persentase rumah / kampung kreatif / inkubasi / berkembang	N/A	N/A	N/A	3,33	43,33
12	Persentase industri usaha jasa pariwisata mendapat stimulus	N/A	N/A	N/A	N/A	9,77

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Persentase kunjungan wisata di Kota Bandung dari tahun 2016-2019 selalu mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan, pada tahun 2019 mencapai 113,14%. Rata-rata lama kunjungan wisata di Kota Bandung dari tahun 2016-2019 mencapai 2 hari. Namun demikian, pada tahun 2020 terjadi perlambatan dalam capaian kunjungan wisata dan lama kunjungan wisata serta penerimaan PAD terkait sektor kepariwisataan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena Kota Bandung sebagai salah satu tujuan kota wisata terdampak akibat pandemik Covid-19 yang sampai saat ini masih terjadi dan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku.

## c. Pertanian

### 1) Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produktivitas tanaman pangan adalah kemampuan suatu tanah untuk menghasilkan tanaman pangan yang sedang diusahakan dengan sistem pengelolaan tertentu, termasuk didalamnya proses produksi. Walaupun Kota Bandung bukan merupakan daerah sentra produksi pertanian akan tetapi masih berpotensi untuk menghasilkan produk pertanian, seperti padi dan palawija. Dari data di lapangan, diketahui bahwa sentra produksi padi di Kota Bandung adalah Kecamatan Ujungberung, Rancasari, Cibiru, Cinambo, Gedebage, Buahbatu, dan Arcamanik. Untuk produktivitas padi per hektar Kota Bandung tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.82.

**Tabel 2.82**  
Produktivitas Padi Per Hektar Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produktivitas padi per hektar (ton/ha)	6.805	6.808	6.808	6.808	6.823

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa produktivitas tanaman padi cenderung meningkat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dimana pada tahun 2020 sebanyak 6.823 ton/Ha.

### 2) Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Mengingat Kota Bandung bukan merupakan daerah sentra produksi pertanian, kehutanan, dan perikanan, maka kontribusi sektor tersebut terhadap pencapaian PDRB Kota Bandung pun nilainya cukup kecil. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Bandung dalam kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.83.

**Tabel 2.83**  
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Bandung  
Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	0,12%	0,12%	0,11%	0,10%	0,10%

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kota Bandung dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 senilai 0,12% namun pada tahun 2020 menjadi 0,10%. Hal tersebut disebabkan karena luas lahan produksi sektor pertanian dari tahun ke tahun mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi areal fungsi lainnya yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi sesuai karakteristik kebutuhan di wilayah perkotaan misalkan areal komersial, hunian, perkantoran, dll. Indikator lainnya pada Urusan Pertanian dapat dilihat pada Tabel 2.84.

**Tabel 2.84**  
Indikator Kinerja Urusan Pertanian  
Di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Pertanian	Orang	N/A	N/A	N/A	102	45
2	Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Peternakan	Orang	N/A	N/A	N/A	81	32
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	N/A	N/A	N/A	84	90,03
6	Produksi Tanaman Sayuran	Pohon	N/A	N/A	N/A	813.880	767.340
7	Produksi Tanaman Hias	Pohon	N/A	N/A	198.959	412.144	163.895

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
8	Jumlah Penanaman Pohon Buah-buahan	Pohon	N/A	N/A	N/A	53.869	20.717
9	Persentase Kualitas bahan baku tembakau	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100
10	Populasi Ternak Domba	Ekor	N/A	34.684	35.702	36.793	37.844
11	Produksi Ikan Hias	Ekor	N/A	N/A	1.222.000	1.823.200	1.282.278
12	Produksi Ikan Konsumsi	Ton	2.965	N/A	2.970	2.981,27	1.921,05
13	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kapita/tahun	N/A	N/A	37,95	40,23	40,24

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

#### d. Perdagangan

Nilai ekspor perdagangan Kota Bandung pada tahun 2020 adalah sebesar US\$ 321,26 juta, dihitung berdasarkan atas penerbitan surat keterangan asal komoditi yang merupakan rekomendasi yang menyatakan barang tersebut diproduksi di Kota Bandung. Tabel 2.85 merupakan gambaran mengenai ekspor perdagangan Kota Bandung selama kurun waktu 2016-2020.

**Tabel 2.85**

Ekspor Bersih Perdagangan Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ekspor perdagangan (\$ juta)	609	465	465	466	321,26

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Indikator lainnya pada Urusan Perdagangan dapat dilihat pada Tabel 2.86.

**Tabel 2.86**

Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	N/A	N/A	81,05	82,55	83,46
2	Nilai Ekspor	Juta US\$	609	465	465	466,159	321,26
3	Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	N/A	0,27	13,74	9,22	8,49
4	Cakupan pembinaan e-commerce	Pelaku Usaha	N/A	100	150	150	N/A
5	Meningkatnya kualitas pelaku perdagangan dalam negeri	Pelaku Usaha	N/A	385	300	255	N/A
6	Meningkatnya Alat UTTP yang ditera dan ditera ulang	Alat UTTP	N/A	N/A	N/A	124.646	190.063
7	Informasi mengenai barang kena cukai ilegal	Merk Rokok	N/A	N/A	10	15	16
8	Nilai daya saing perdagangan e-commerce	Poin	N/A	N/A	N/A	361,44	401,60
9	Nilai daya saing perdagangan	Poin	N/A	N/A	N/A	360,59	460,59

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

#### e. Perindustrian

Kota Bandung memiliki potensi industri, baik industri skala menengah atau kecil. Pada tahun 2020, berdasarkan unit usaha terdapat 1.433 industri menengah dan 2.561 industri kecil formal di Kota Bandung. Adapun berdasarkan tenaga kerja, pada industri menengah terdapat 82.073 orang dan industri kecil formal sebanyak 21.389 orang, sebagaimana potensi sektor industri di Kota Bandung tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.87.

**Tabel 2.87**

Potensi Sektor Industri di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Industri Menengah	N/A	N/A	835	27.263	321	35.063	334	35.507	1.433	82.073
2	Industri Kecil Formal	N/A	N/A	2.932	46.540	3.722	70.285	3.723	70.287	2.561	21.398

Sumber: Disdagin Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa untuk industri besar tidak terdapat data unit usaha dan tenaga kerja karena pembinaannya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, sedangkan industri kecil dan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2015. Industri kecil formal dan non formal di Kota Bandung merupakan sektor industri terbesar dalam jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja. Adapun data rinci sektor industri kecil dapat dilihat pada Tabel 2.88.

**Tabel 2.88**

Potensi Sektor Industri Kecil di Kota Bandung Tahun 2016- 2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Industri Kecil Pangan	518	2.214	516	2.210	423	3.227	425	3.258	425	3.258
2	Industri Kecil Sandang	1.237	6.253	1.273	6.253	814	8.770	814	8.770	814	8.770
3	Industri Kecil Kimia dan Bahan Bangunan	36	124	36	124	99	700	100	702	101	708
4	Industri Kecil Logam dan Elektronika	222	451	222	451	165	1.224	165	1.224	165	1.224
5	Industri Kecil Kerajinan	711	3.762	711	3.762	11	75	11	75	11	75

Sumber: Disdagin Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Indikator lainnya pada Urusan Industri dapat dilihat pada Tabel 2.89.

**Tabel 2.89**

Indikator Kinerja Urusan Industri di Kota Bandung Tahun 2016- 2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Industri Kecil Menengah Tersertifikasi	IKM	N/A	600	410	350	476
2	Jumlah industri Kecil Menengah yang meningkat daya saingnya	IKM	N/A	N/A	N/A	280	283
3	Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang meningkat kemampuannya dalam proses produksi	Pelaku Usaha	N/A	N/A	N/A	250	150
4	Jumlah Sentra Industri yang meningkat daya saingnya	Sentra	N/A	N/A	N/A	1	4

### 2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

#### a. Sekretariat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat yang berupa angka. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan

masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menjelaskan definisi dan beberapa unsur penilaian SKM kategori baik dengan nilai interval 76,61-88,30. Adapun kriteria IKM Baik dalam Perencanaan Strategis Kota Bandung adalah minimal 83,00. Pada tahun 2020 Perangkat Daerah dengan Nilai IKM “Baik” (minimal 83) terdapat 58 Perangkat Daerah atau 96,67% dari target 70,00%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 138,10%. Realisasi ini meningkat 56,67% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 40% pada 24 Perangkat Daerah. Secara riil jumlah SKPD yang memperoleh nilai IKM diatas 83 meningkat sebanyak 34 Perangkat Daerah dibanding tahun 2019.

3 - 38 LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2020 Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Bandung telah pula mengamanatkan pelayanan publik yang berorientasi pada Kepuasan masyarakat dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yang hasilnya diperoleh melalui melalui pengukuran kepuasan pelayanan masyarakat kota pada seluruh unit layanan SKPD. Survei pelayanan publik pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung, mencakup pelayanan langsung dan tidak langsung kepada masyarakat, terdiri dari 9 (sembilan) unsur meliputi persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan serta tindak lanjut, sarana dan prasarana. Atas dasar Rekomendasi DPRD Kota Bandung dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan langkah-langkah konkrit berupa:

- a. Fasilitasi Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk melakukan SKM setiap semester, bahwa survei dilakukan oleh pemberi layanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan), atau 6 (enam) bulan (semester) atau minimal 1 (tahun) sekali.
- b. Melakukan upaya penyeragaman metode survei melalui 9 Unsur Pelayanan;
- c. Pengumpulan data SKM melalui aplikasi e-SKM (skm.bandung.go.id).

Data capaian kinerja pelayanan publik pada perangkat daerah di Kota Bandung, sebagaimana Tabel 2.90.

**Tabel 2.90**  
Daftar Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	IKM
1	Sekretariat Daerah	87,818
2	Dinas Tenaga Kerja	85,833
3	Dinas Pemuda dan Olah Raga	81,517
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	84,722
5	Satuan Polisi Pamong Praja	83,092
6	Dinas Pangan dan Pertanian	90,028
7	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	87,246
8	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	84,160
9	Dinas Pekerjaan Umum	83,007
10	Dinas Penataan Ruang	85,002
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	83,755
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,800
13	Dinas Perhubungan	91,846
14	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	86,370
15	Dinas Kesehatan	83,611
16	Dinas Pendidikan	83,882
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	85,139
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	84,865

NO	PERANGKAT DAERAH	IKM
19	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan	91,166
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	83,611
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	83,462
22	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan	84,444
23	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	87,103
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	85,260
25	BPPD	90,789
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90,417
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	91,770
28	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	84,412
29	Kec. Bbk. Ciparay	82,937
30	Kec. Cidadap	84,074
31	Kec. Bojongloa Kidul	83,278
32	Kec. Bandung Kulon	83,167
33	Kec. Antapani	86,019
34	Kec. Mandalajati	83,696
35	Kec. Arcamanik	84,333
36	Kec. Ujungberung	85,963
37	Kec. Cibiru	84,665
38	Kec. Panyileukan	88,074
39	Kec. Rancasari	89,757
40	Kec. Buahbatu	84,584
41	Kec. Bandung Kidul	90,972
42	Kec. Cinambo	86,426
43	Kec. Gedebage	86,296
44	Kec. Astanaanyar	86,111
45	Kec. Sukasari	91,996
46	Kec. Sukajadi	83,177
47	Kec. Cicendo	86,618
48	Kec. Andir	84,314
49	Kec. Coblong	87,889
50	Kec. Bdg Wetan	83,088
51	Kec. Smr Bandung	83,824
52	Kec. Cbny Kaler	84,778
53	Kec. Cbny Kidul	84,375
54	Kec. Kiaracondong	83,230
55	Kec. Batununggal	86,325
56	Kec. Lengkong	83,016
57	Kec. Regol	86,303
58	Kec. Bjl Kaler	89,756
59	Inspektorat Kota	85,470
60	Sekretariat DPRD	83,750

Sumber: LKPJ Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Hasil pengukuran kinerja Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik (minimal 83,00) pada tahun 2020 terealisasi sebesar 96,67% atau sebanyak 58 dari 60 Perangkat Daerah dengan jumlah responden sebanyak 5.776 orang. Bila diukur dari target tahun 2020 sebesar 70% maka capaian kinerjanya melebihi dari target sebesar 26,67%. Capaian kinerja ini meningkat 50,67% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 dimana persentase Perangkat daerah yang memiliki nilai minimal 83,00 adalah sebesar 40,00% atau 24 dari 60 Perangkat Daerah. Survei pelayanan publik pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung, mencakup pelayanan langsung dan tidak langsung kepada masyarakat, terdiri dari 9 unsur meliputi persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah

tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan serta tindak lanjut, sarana dan prasarana.

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Hasil evaluasi AKIP menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil. Capaian kinerja AKIP Kota Bandung pada tahun 2020 berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/293/AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar 78,97 atau kategori BB sedangkan target kinerjanya adalah kategori A (minimal 80,01) dengan capaian kinerja kualitatif dikuantifikasi sebesar 98,70% dan meningkat sebesar 0,97 poin bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 78,00. Untuk capaian realisasi AKIP Kota Bandung tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.91.

**Tabel 2.91**

Capaian Realisasi AKIP Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	2016	2017	Nilai 2018	2019	2020
1	Perencanaan Kinerja	30	24,82	25,41	25,57	25,35	25,39
2	Pengukuran Kinerja	25	20,67	19,96	20,01	18,48	18,60
3	Pelaporan Kinerja	15	11,89	12,60	12,61	11,34	11,78
4	Evaluasi Kinerja	10	7,47	7,00	7,02	7,60	7,74
5	Capaian Kinerja	20	15,76	15,40	14,84	15,23	15,45
	Nilai Hasil Evaluasi	100	80,61	80,37	80,05	78,00	78,97
	Kategori Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A	A	BB	BB

Sumber: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KEMENPANRB Tahun 2021

Hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. EKPPD 2019 terhadap LPPD Tahun 2018 yang dituangkan dalam Piagam Penghargaan tanggal 25 April 2020 adalah sebesar 3,4013 dengan Kategori Sangat Tinggi, capaian ini sesuai dengan target Tahun 2020 atau capaian kinerja sebesar 100,00%, dan sama kategori Sangat Tinggi bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 dengan nilai 3,3019. Dari data tersebut capaian LPPD pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,0994 poin, sebagaimana bahwa capaian indikator kinerja urusan Sekretariat Daerah Tahun 2016-2020 dapat terlihat pada Tabel 2.92.



**Tabel 2.92**

Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Daerah  
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai LPPD	Nilai	2,9919	3,3040	3,4144	3,3019	3,4013
2	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	100	100	100	128	147
3	Rata-rata IKM Kota Bandung	Angka	80	82,02	82,88	N/A	N/A
	Nilai IKM "Baik" (minimal 83)	%	N/A	N/A	N/A	40,00	96,67
4	Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen Pelaporan Kinerja	Angka	11,89	12,60	12,61	11,34	11,78
5	Rasio Berita Baik dan Berita Buruk	%	N/A	86,14	82,18	82,96:17,04	97,70:2.30
6	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	N/A	N/A	80,05	78,00	78,97
7	Terlaksananya Penerimaan Tamu Negara, Pemerintah/ Departemen /Lembaga	%	100	100	100	100	100
8	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi serta kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100
9	Persentase Penataan Batas Daerah dan Batas Wilayah	%	100	100	100	100	100
10	Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	%	N/A	N/A	N/A	N/A	63,33
11	Persentase pengendalian kualitas pembangunan daerah		N/A	100	100	100	100
12	Cakupan kegiatan Bidang Sosial Keagamaan yang terfasilitasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100
13	Persentase Implementasi kerja sama lingkup dalam dan luar negeri	%	N/A	N/A	N/A	N/A	111,8
14	Persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari TJSJ dan Sumbangan Pihak Ketiga	%	N/A	N/A	N/A	100	100

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
15	Persentase BUMD yang tercapai kinerjanya (keterangan: masing masing bumd diberikan taget kinerja sesuai dengan tujuan dibentuknya)	%	N/A	N/A	N/A	N/A	40
16	Persentase permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Perekonomian yang diselesaikan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100
17	Persentase Rancangan Kebijakan bidang Sosial kemasyarakatan yang ditindaklanjuti dan Cakupan kegiatan Bidang Kesra yang terfasilitasi	%	N/A	N/A	N/A	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Capaian kinerja indikator Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mencapai target sesuai dengan yang ditentukan. Pada tahun 2019 dan 2020, kinerjanya melebihi target yang telah ditentukan. Produk hukum tersebut diantaranya Raperda, Raperwal, Rakepwal dan jumlah penanganan perkara.

Analisa rasio berita baik dan buruk dapat menandai bagaimana kinerja suatu instansi dalam mengambil langkah ketika dihadapkan pada media krisis dimana Pemerintah Kota dituntut untuk menjaga citra baik Kota. Rasio memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Bandung dalam menyampaikan atau mensosialisasikan program pembangunan Kota kepada Masyarakat. Ada pun Rasio berita baik berbanding dari rasio berita buruk tahun 2020 yaitu 97,70:2.30.

Pada tahun 2019 capaian indikator kinerja Persentase Penataan Batas Daerah dan Batas Wilayah terealisasi sebesar 100% dengan output kegiatan 1 dokumen penataan batas daerah dan batas wilayah. Pada tahun 2020 capaian persentase penataan batas terealisasi sebesar 100% dengan output dokumen kegiatan dalam pelaksanaan pemasangan patok sebanyak 51 titik terdiri dari:

- a. Kota Bandung – Kab. Bandung 42 titik
- b. Kota Bandung – Kab. Bandung Barat 3 titik
- c. Kota Bandung – Kota Cimahi 6 titik

Indikator kinerja persentase Kecamatan Berkinerja Baik dilaksanakan melalui penilaian Evaluasi Kinerja (Evkin) Camat dan Lurah. Periode pelaksanaan penilaian Evkin Camat dan Lurah tahun 2020 dimulai 1 November 2019 s.d. 31 Oktober 2020. Hasil penilaian Evkin Camat tahun 2020 berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 138/Kep.236-Pem/2021 tentang Penetapan Peringkat Hasil Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah Tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Kategori Berkinerja Baik: 19 Kecamatan (63,33%);
- b. Kategori Berkinerja Sedang: 11 Kecamatan (36,67%); dan
- c. Kategori Berkinerja Rendah: 0 Kecamatan (0%).

Indikator Persentase Pengendalian Kualitas Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui monitoring terhadap pekerjaan infrastruktur Perangkat Daerah yang strategis dan prioritas terealisasi sebesar 100% mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Adapun yang dimaksud dengan realisasi 100% diindikasikan melalui terkendalinya pembangunan infrastruktur strategis dan prioritas melalui monitoring dan evaluasi pekerjaan infrastruktur perangkat daerah berdasarkan rencana dengan pelaksanaan pekerjaannya sebagai bahan kebijakan.

Indikator cakupan kegiatan bidang sosial keagamaan yang terfasilitasi diupayakan melalui Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, pada tahun 2020 terealisasi sebesar 100% yang terdiri dari:

- a. Kegiatan Safari Minggu, safari Jum'at dan Safari Ramadhan;
- b. Kegiatan Pembinaan Guru Keagamaan;
- c. Kegiatan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Masjid Agung Al-Ukhuwah;
- d. Kegiatan Kajian tentang Monitoring dan Evaluasi kegiatan Sosial Keagamaan; dan
- e. Kegiatan Pelaksanaan hibah (laporan Hibah).

Kerjasama luar negeri yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Bandung menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan 2018 tetapi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan tren penurunan, dan sampai dengan tahun 2020 telah terlaksana sebanyak 41 kerjasama.

Sasaran persentase realisasi program/agenda 7 bidang prioritas pembangunan yang dibiayai dari Program TJSJ dan Sumbangan Pihak Ketiga, pada tahun 2019 dan 2020 terealisasi sebesar 100%, diukur dari terpenuhinya 7 bidang prioritas pembangunan oleh kegiatan program/kegiatan TJSJ Perusahaan sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Jumlah Perusahaan yang Memberikan Sumbangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sumbangan Pihak Ketiga.

Pembinaan teknis BUMD meliputi organisasi, manajemen, keuangan, kepengurusan, pendayagunaan asset, pengembangan bisnis dan melakukan Monev Kinerja BUMD. Adapun target indikator Persentase BUMD yang Tercapai Kinerjanya adalah melakukan pembinaan teknis kepada BUMD untuk meningkatkan profitnya dimana target tersebut adalah 40% BUMD yang profitnya meningkat setiap tahun dari jumlah BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung saat ini yaitu 5 BUMD (PDAM Tirtawening Kota Bandung, PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung, PD. Kebersihan Kota Bandung, Perumda BPR Kota Bandung, dan PT. Bandung Infra Investama Kota Bandung).

Persentase Permasalahan Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Perekonomian yang diselesaikan di bidang pengadaan barang/jasa pada tahun 2020 sebesar 100%, dengan rincian program pengadaan barang dan jasa daerah 100%, Kegiatan Pengelolaan Barang/Jasa 100%, Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 70 Paket Pekerjaan, Penyelenggaraan Elektronik *Procurement* di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung 97 Paket, Bandung *Integrated Resources Management System* (BIRMS) sebanyak 6002 paket, kegiatan fasilitasi pembinaan pengadaan barang dan jasa 4 dokumen.

## b. Sekretariat DPRD

Indikator kinerja dari unsur Sekretariat DPRD selama tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.93.

**Tabel 2.93**  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat DPRD  
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung kepada Sekretariat DPRD Kota Bandung terhadap Fasilitasi Kebutuhan Kerja DPRD	%	80	80	80	81,5	85
2	Rata-rata waktu Fasilitasi Penyampaian Aspirasi Masyarakat ke Anggota DPRD melalui Komisi-komisi	Menit	100	90	120	90	85

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan tabel di atas, untuk target Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD pada periode Tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami stagnansi. Hal ini dikarenakan masih terkendalanya mekanisme dalam peningkatan pencapaian nilai Indeks Kepuasan serta kompleksnya karakter dari masing-masing para Anggota DPRD. Pada tahun 2019, mulai dicoba pelaksanaan pencapaian target yang dilakukan melalui peningkatan secara bertahap. Pada Indikator yang kedua, pelaksanaan fasilitasi terhadap penyampaian aspirasi masyarakat kepada dewan masih fluktuatif dikarenakan kendala sarana pendukung dalam fasilitasi.

### 2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### a. Perencanaan

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah, diantaranya: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tabel 2.94 merupakan gambaran capaian kinerja unsur penunjang perencanaan tahun 2016-2020.

**Tabel 2.94**  
Capaian Indikator Kinerja Unsur Penunjang Perencanaan  
Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
4	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%	100%	100%	100%	100%
5	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	24,82	25,41	25,41	25,57	25,35
6	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	20,67	19,96	19,96	20,01	18,48
7	Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	79%	66%	68%	80%	76,19%
8	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,13	77,18	77,92	79,72	84,41

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
10	Jumlah Rancangan RKPD Tingkat Kota	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
11	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dok	2 Dok	2 Dok	3 Dok	2 Dok
12	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumberdaya Keuangan dan Sumber Daya Alam	9 Dok	7 Dok	17 Dok	4 Dok	4 Dok
13	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	6 Dok	3 Dok	7 Dok	3 Dok	3 Dok
14	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkun Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	7 Dok	4 Dok	14 Dok	3 Dok	3 Dok
15	Persentase Rekomendasi hasil Monev yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	100%	100%	100%
16	Persentase Dokumen Pelaporan Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
17	Capaian Penggunaan DBHCHT di Kota Bandung sesuai aturan	100 %	100 %	100 %	100%	100%

Sumber: Bappelitbang Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan Tabel 2.94, dapat dilihat bahwa nilai SAKIP komponen perencanaan dan pengukuran kinerja cenderung menurun. Berdasarkan hasil evaluasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/293/AA.05/2021 tentang Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020, penurunan tersebut disebabkan antara lain karena target kinerja RPJMD belum seluruhnya dikawal oleh Perangkat Daerah pengampu kinerja. Selain itu faktor lain yang berpengaruh terhadap penurunan pencapaian kinerja perencanaan adalah bahwa hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya digunakan untuk upaya perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

Indikator kinerja lainnya yang sangat menunjang kepada pencapaian kinerja RPJMD adalah Indeks Kepuasan Masyarakat yang pencapaian kerjanya terus meningkat. Peningkatan nilai IKM Bappelitbang ini ditunjang oleh peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan, prosedur serta SDM pelayanan.

## b. Keuangan

Indikator Keuangan Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.95.

**Tabel 2.95**

Indikator Keuangan Kota Bandung Tahun 2016–2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan (Realisasi)	37,87%	44,96%	43,29	40%	37%
	PAD (Realisasi) Rp M	2.1528	2.578,5	2.571,6	2.548,2	2.063,4
	Jumlah Pendapatan Daerah (realisasi)	5.685,1	5.735,0	5.939,9	6.381,8	5.643,6
2	Hasil Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
3	Persentase SILPA	9,13%	10,86%	3,82	4%	4%
	Total SILPA Rp.M	532,1	601,8	233,8	231,20	236,35
	Total APBD (realisasi) Rp M	5.830,4	5.541,7	6.114,4	6.310,6	5.407,3
4	Persentase Belanja Pendidikan (20%) (Realisasi)	28,93%	21,53%	23,69	29%	26%
	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan (Realisasi) Rp M	1.686,6	1.193,1	1.448,6	1.837,80	1.383,86
	Total APBD (Realisasi) Rp M	5.830,4	5.541,7	6.114,4	6.310,6	5.407,3
5	Persentase belanja kesehatan (Realisasi)	10,82%	16,10%	18,93	19%	21%
	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan (Realisasi) Rp M	630,8	892,1	1.157,6	1.188,40	1.117,66
	Total APBD (Realisasi) Rp M	5.830,4	5.541,7	6.114,4	6.310,6	5.407,3
6	Perbandingan antara belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung (Realisasi)	56,16%	51,48%	50,09	55%	49%
		43,84%	48,16%	49,91	45%	51%
	Jumlah Belanja Langsung (Realisasi) Rp M	3.274,3	2.852,9	3.063,0	3.473,9	2.643,24
	Total APBD (Realisasi) Rp M	5.830,4	5.541,7	6.114,4	6.310,6	5.407,3
	Jumlah Belanja Tidak Langsung (Realisasi) Rp M	2.556,1	2.668,9	3.051,4	2.838,1	2.764,05
	Total APBD (Realisasi) Rp M	5.830,4	5.541,7	6.114,4	6.310,6	5.407,3
7	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
8	Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBP	(42 HK untuk RAPBD dan 15 HK untuk RAPBDP)	(8 HK untuk RAPBD dan 15 HK untuk RAPBDP)	(26 HK untuk RAPBD dan 2 HK untuk RAPBDP)	46 Hari Kerja RAPBD dan 6 Hari Kerja	
9	Rata rata Penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai Perundang undangan	2HK	2HK	2HK	2HK	2HK
10	Laporan Keuangan Kota Bandung tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan	-	-	14 Dok	14 Dok	14 Dok

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
11	Laporan BMD Kota Bandung tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang - undangan	-	-	2 Dok	2	2 Dok
12	Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang undangan	-	-	30 Lok/Bidang	30	30 Lokasi
13	Persentase tanah milik pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN	-	29%	20%	22,78%	22,78%
14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	84,19	85,260
15	Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah	-	89,26	91,39	91,84	91,84
16	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	-	2.160.181.714.001	2.154.648.077.249	1.629.188.481.446	1.629.188.481.446
17	Nilai SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah	-	-	-	-	98,99

Sumber: BPKA Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Opini BPK terhadap laporan kinerja pemerintah daerah Kota Bandung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 – 2018 termasuk predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), akan tetapi pada tahun 2019 – 2020 mengalami peningkatan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam hal penetapan APBD, hanya tahun 2015 yang termasuk kategori tidak tepat waktu, namun seiring dengan adanya perbaikan dan perubahan sistem pendukung penganggaran maka mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan kategori menjadi tepat waktu. Selain itu, dalam hal penyelesaian SP2D tepat waktu yang merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007. Capaian Penyelesaian SP2D tepat waktu dari tahun 2016 – 2020 rata-rata diterbitkan maksimal 2 Hari Kerja.

### c. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung sebagai unsur penunjang urusan yang menyelenggarakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang kepegawaian harus mampu mewujudkan pengelolaan manajemen kepegawaian secara optimal dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) aparatur sebagai motor penggerak sistem organisasi pemerintahan Kota Bandung. Pengelolaan pegawai yang optimal dikuantifikasikan ke dalam indikator-indikator kinerja kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, dengan hasil capaian kinerja disajikan pada Tabel 2.96.

**Tabel 2.96**

Capaian Indikator Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	N/A	N/A	N/A	100%	100%
2	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun	N/A	N/A	N/A	81,00%	61%
3	Persentase pemenuhan ASN masing-masing PD sesuai kompetensi dan beban kerja	N/A	N/A	N/A	74,17%	80,59%
4	Persentase PD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin sedang dan berat.	86,11%	73,97%	80,8%	91,67%	90%
5	Persentase akurasi data kepegawaian	99,92%	93,89%	96,38%	98,06%	98,45%
6	Persentase penempatan dan pengembangan kompetensi sesuai hasil assessment	N/A	N/A	N/A	69,77%	79,89%
7	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	92,59%	92,38%	93,5%	89%	89,09
8	Persentase Perangkat Daerah yang pegawainya Disiplin dan Berkinerja dengan Kategori Baik	N/A	N/A	N/A	95,83%	95
9	Indeks Survei Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	79,04%	81,64%	81,97%	82,38%	92,42

Sumber: BKPP Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Persentase pelayanan administrasi kepegawaian pada Tahun 2019 dan 2020 dapat dilaksanakan 100% secara tepat waktu sesuai dengan kewenangan dan standar operasional prosedur pada BKPP. Perhitungannya didasarkan pada jumlah pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dibagi jumlah pelayanan administrasi kepegawaian. Sedangkan untuk persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun mengalami penurunan dari Tahun 2019, capaian tersebut didasarkan pada perhitungan jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi 20 JP per tahun dibagi dengan jumlah seluruh ASN, dimana jumlah ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi 20 JP sebanyak 8.708 orang, jumlah seluruh ASN sebanyak 14.276 orang.

Capaian kinerja untuk persentase pemenuhan ASN masing-masing Perangkat Daerah sesuai kompetensi dan beban kerja mengalami peningkatan dari tahun 2019. Capaian tersebut didasarkan pada perhitungan pemenuhan kompetensi PNS terhadap kualifikasi yang dipersyaratkan untuk masing-masing jabatan mencapai 98,63 % dan pemenuhan PNS sesuai dengan beban kerja masing-masing perangkat daerah sebesar 63 %, maka didapat rata-rata persentase pemenuhan ASN yang sesuai dengan kompetensi dan beban kerja. Persentase Perangkat Daerah yang tidak terdapat pelanggaran disiplin sedang dan berat cenderung naik dan turun dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Capaian tersebut didasarkan pada banyaknya Perangkat Daerah yang pegawainya melakukan pelanggaran disiplin sedang/berat.

Persentase akurasi data kepegawaian cenderung mengalami peningkatan dari Tahun 2017 s/d 2020 namun pada Tahun 2017 mengalami penurunan disebabkan oleh banyaknya data pegawai yang tidak akurat, baik datanya tidak lengkap atau tidak benar.



Persentase penempatan dan pengembangan kompetensi sesuai hasil assessment mengalami peningkatan dari Tahun 2019, capaian tersebut didasarkan pada jumlah ASN yang telah diketahui profil kompetensinya sebanyak 2.355 orang dan telah di tempatkan sesuai dengan hasil uji kompetensi dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sebanyak 1.726 orang, maka didapatkan rata-rata persentase ASN yang ditempatkan dan di kembangkan sesuai hasil uji kompetensinya sebesar 79,89%. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi cenderung mengalami penurunan dari Tahun 2016 s/d 2020, perhitungannya didasarkan pada jumlah ASN yang memenuhi standar kompetensi dibagi jumlah ASN. Adapun yang dimaksud kompeten adalah yang memenuhi standar pendidikan, golongan dan diklat.

Sedangkan untuk persentase Perangkat Daerah yang Pegawainya Disiplin dan Berkinerja dengan Kategori Baik mengalami penurunan dari Tahun 2019, perhitungannya didasarkan pada rata-rata persentase dari perangkat daerah yang tidak terdapat pelanggaran disiplin dan persentase perangkat daerah yang penilaian kinerja dengan kategori baik.

Survei Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dari tahun 2016 smpai dengan 2020 cenderung mengalami peningkatan. BKPP Kota Bandung melaksanakan survei kepuasan pelayanan yang dilakukan secara elektronik melalui [skm.bandung.go.id](http://skm.bandung.go.id). Survei Kepuasan Masyarakat ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang dilakukan melalui 9 unsur pelayanan dengan sasaran penerima layanan kepegawaian yaitu Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

#### d. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan memiliki peranan yang penting sebagai pendukung dalam membangun suatu daerah. Indikator Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti telah mencapai 100% pada tahun 2019 dan 2020. Perkembangan penelitian dan pengembangan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.97.

**Tabel 2.97**

Perkembangan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016–2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan (%)	100	100	100	100	100
2	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti (%)	50	70	75	100	100
3	Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah	9	11	16	12	N/A

Sumber: Bappelitbang Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terus mengalami peningkatan. Namun demikian diperlukan perumusan tata kelola pemanfaatannya secara berkala untuk mendapatkan hasil monitoring dan evaluasi bertahap terhadap pelaksanaan hasil kelitbangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renja Perangkat Daerah diharapkan memperhatikan dan mempertimbangkan hasil-hasil kajian kelitbangan. Peran litbang dalam melakukan scanning lingkungan internal dan eksternal sebagai dasar perencanaan (*planning by research*), fungsi formulasi kebijakan (*formulating policy*), dan fungsi kontrol (*controlling*)

menghasilkan berbagai *proxy*, model, dan pilihan kebijakan yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan, baik itu untuk perencanaan, perumusan kebijakan, serta pembinaan dan pengawasan pembangunan. Oleh sebab itu, penatakelolaan kelitbangan dan inovasi membutuhkan komitmen bersama dalam rangka membangun budaya perumusan kebijakan dengan landasan utama berupa hasil kajian ilmiah berbasis kelitbangan tematik dan terapan, serta pendayagunaan hasil – hasil penelitian sebagai panduan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

### 2.3.6. Unsur Pengawasan

Unsur pengawasan merupakan alat evaluasi terhadap program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Indikator pengawasan di Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.98.

**Tabel 2.98**  
Perkembangan Indikator Pengawasan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material	80,33%	83,61%	78,62%	N/A	N/A
2	Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP	65%	80%	73,53%	N/A	N/A
3	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	21,93%	76,32%	51,78%	5,24%	2,21%
4	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	19,91%	39,95%	51,78%	11,31%	3,21%
5	Persentase SKPD yang Tertib administrasi barang / aset daerah	60%	70%	N/A	N/A	N/A
6	Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B	70,49%	91,80%	N/A	96,83%	90%
7	Persentase Aduan masyarakat atas Pelayanan publik yang ditindaklanjuti	100%	100%	N/A	N/A	90%
8	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	N/A	N/A	N/A	Nilai 3,00	Nilai 3,00
9	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Yang Memiliki Standar Kompetensi	80%	N/A	N/A	80%	N/A
10	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Perangkat Daerah yang Menyatakan Puas Atas Layanan Inspektorat Kota Bandung	72%	76%	70%	82%	84%
11	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A	Nilai 68	Nilai 85

Sumber: Inspektorat Kota Bandung, yang dikelola dalam SIPD

Pada indikator Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material, tahun 2016 terdapat 54 Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan berindikasi korupsi dari 67 Perangkat Daerah yang diperiksa, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 80,33%. Tahun 2017 terdapat 56 Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan berindikasi korupsi dari 67 Perangkat Daerah yang diperiksa, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 83,61%. Tahun 2018 terdapat 50 Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan berindikasi korupsi dari 63 Perangkat Daerah yang diperiksa, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 78,62%. Tahun 2019 dan seterusnya indikator ini dan Persentase SKPD yang Tertib administrasi barang/aset daerah, tidak menjadi Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Bandung, karena menjadi bagian dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK RI.

Indikator Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP, pada tahun 2016 terdapat 39 Perangkat Daerah yang telah menyusun dan mengimplementasikan SPIP dari 60 Perangkat Daerah, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 65%, namun pada tahun 2019 dan seterusnya indikator ini berubah nama menjadi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dengan capaian kinerja setiap tahun minimal nilai 3,00.

Indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti, tercapai kinerja sebesar 21,93% dan 19,91% pada tahun 2016, meningkat di tahun 2017 sebesar 76,32% dan 39,95%. Pada tahun 2019 dan seterusnya formula penghitungan mengalami peningkatan menjadi Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti dan berstatus selesai, sehingga tahun 2019 yang merupakan tahun ke 1 renstra, capaian kinerja akhir tahun mencapai 5,24%, dimana realisasi 4.082 rekomendasi yang ditindaklanjuti dari target 4.513 rekomendasi, 236 rekomendasi sudah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai.

Indikator Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B, mulai tahun 2016 mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 96,83% dari 64 Perangkat Daerah. Mulai tahun 2020 target ditingkatkan menjadi minimal BB, sehingga mencapai 90% atau 58 Perangkat Daerah yang mendapat nilai AKIP "BB".

Indikator Persentase aduan masyarakat atas pelayanan publik yang ditindaklanjuti, pada tahun 2020 mencapai 90%, dengan rentang 10% aduan masyarakat yang tidak sesuai kriteria dan tidak dapat ditindaklanjuti seperti identitas yang tidak jelas, atau permasalahan yang tidak jelas.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Perangkat Daerah yang Menyatakan Puas Atas Layanan Inspektorat Kota Bandung, setiap tahun mengalami kenaikan hingga tahun 2020 mencapai 84% (Baik) dari 60 koresponden perangkat daerah.

Indikator persentase capaian pelaksanaan dari target PMPRB sebesar 85 point, hasil evaluasi Kemenpan RB Tahun 2019 hanya mencapai 68 poin atau 80%. Indikator persentase capaian sistem pengawasan/pengendalian intern yaitu sudah dibangunnya aplikasi simWaster (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Terpadu). Indikator tingkat pemenuhan kapabilitas aparat pengawas realisasi level 2 karena belum selarasnya perencanaan pengawasan dengan laporan hasil pengawasan.

## **2.4. Aspek Daya Saing Daerah**

### **a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga**

Secara total, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian di Kota Bandung. Perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kota Bandung tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.99.